



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.1.1/1 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2025

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa guna tertib pelaksanaan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Dinas sebagai penjelasan dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI PEKALONGAN,
FADIA ARAFIQ



Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
4. Inspektur;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
 Nomor : 100.3.1.1/1
 Tanggal : 2 Januari 2025

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 TAHUN 2025

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
2.	Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
3.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
4.	Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
5.	Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
6.	Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	RSUD KRATON
7.	Remunerasi pada BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan	RSUD KRATON
8.	Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan	RSUD KRATON
9.	Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Permohonan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD pada RSUD Kraton	RSUD KRATON
10.	Peraturan Internal RSUD Kraton	RSUD KRATON
11.	Pedoman Pencegahan Konflik Kepentingan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Pekalongan	BAGIAN PBJ SETDA
12.	Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN PBJ SETDA
13.	Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kab. Pekalongan	SATPOL PP DAN DAMKAR
14.	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP DAN DAMKAR
15.	Tunjangan Khusus PPNS dan Satpol PP	SATPOL PP DAN DAMKAR
16.	SOP Satpol PP dan Damkar	SATPOL PP DAN DAMKAR

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
17.	Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar	DINPERINDAG
18.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	BPKD
19.	Penjabaran Perubahan APBD TA 2025	BPKD
20.	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	BPKD
21.	Analisa Standar Belanja	BPKD
22.	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	BPKD
23.	Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026	BPKD
24.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	BPKD
25.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPKD
26.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya	BPKD
27.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKD
28.	Perubahan Perbup Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DINAS PMD
29.	Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa	DINAS PMD
30.	Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DINAS PMD
31.	Perubahan Perbup Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa	DINAS PMD

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
32.	Perubahan Perbup Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak	DINAS PMD
33.	Perubahan Perbup Nomor. 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa	DINAS PMD
34.	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	DINAS PMD
35.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun 2026	DINAS PMD
36.	Peraturan Pelaksanaan Perda tentang BUMDes	DINAS PMD
37.	Pasar Desa	DINAS PMD
38.	Batas Desa	DINAS PMD
39.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.	DINAS PERKIM DAN LH
40.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan MERKURI	DINAS PERKIM DAN LH
41.	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERKIM DAN LH
42.	Pembentukan LKK dan LKD untuk Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan/atau Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.	DINAS PERKIM DAN LH
43.	Desa/Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Pekalongan	P3A PPKB
44.	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO
45.	Standar Pelayanan pada Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO
46.	Tugas Belajar PNS	BKPSDM
47.	Pemberian Penghargaan ASN	BKPSDM
48.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026	BAPPERIDA
49.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	BAPPERIDA
50.	Penetapan Rencana Kerja Perangkat	BAPPERIDA

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
	Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026	
51.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	BAPPERIDA
52.	Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Tahun 2026	INSPEKTORAT
53.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
54.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.	BAGIAN ORGANISASI
55.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
56.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	BAGIAN ORGANISASI
57.	Uraian Tugas Jabatan Struktural, Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
58.	Pakaian Dinas ASN	BAGIAN ORGANISASI
59.	Road Map	BAGIAN ORGANISASI
60.	Indikator Kinerja Utama	BAGIAN ORGANISASI
61.	Hari Kerja dan Jam Kerja	BAGIAN ORGANISASI
62.	UPTD PPA	BAGIAN ORGANISASI
63.	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Pekalongan	BPBD
64.	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Balai Budidaya Ikan Tawar dan Pemungutan Retribusi Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi	DINLUTKAN
65.	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	DINLUTKAN
66.	Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi	RSUD KESESI
67.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi	RSUD KESESI
68.	Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi	RSUD KESESI
69.	Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi	RSUD KESESI

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
70.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pekalongan	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
71.	Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok	DINAS KESEHATAN
72.	Penyelenggaraan <i>Universal Health Coverage</i> Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	DINAS KESEHATAN
73.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN
74.	Kawasan Tertib lalu Lintas	DINAS PERHUBUNGAN


 BUPATI PEKALONGAN,
 FADIA ARAFIQ